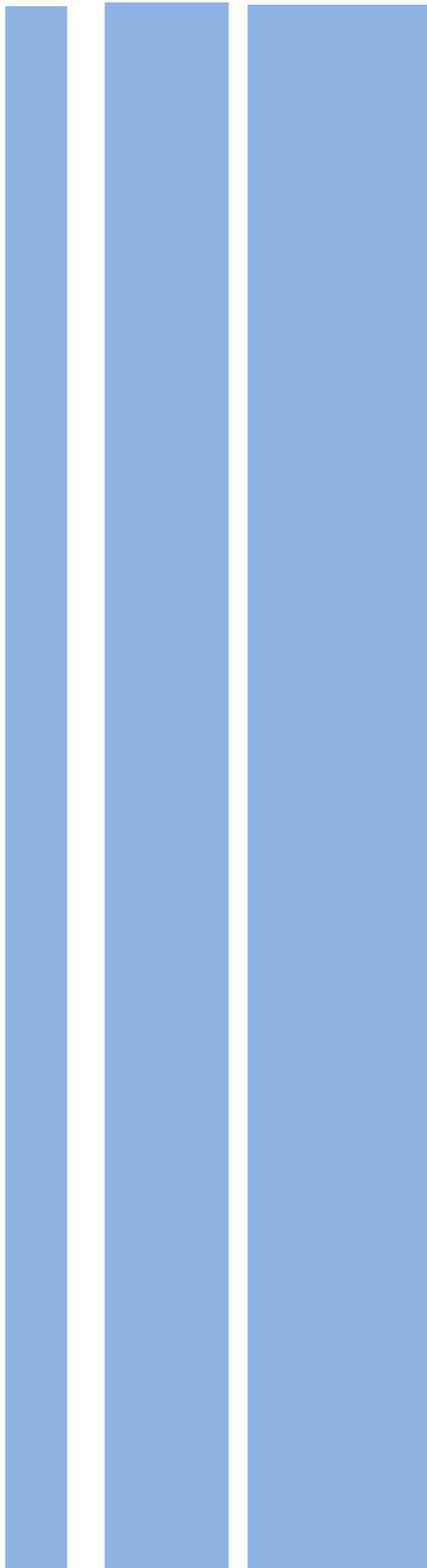


**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM PAPUA (408903)  
Untuk Periode Laporan Tahunan  
Audited Tahun 2023**

Jl Raya Abepura No. 37 Kotaraja  
Jayapura, Papua 99225



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jayapura, 31 Desember 2023  
Kepala Kantor Wilayah,

Anthonyus M. Ayorbaba  
NIP. 197105151996101001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
Laporan Realisasi Anggaran	x
Neraca	x
Laporan Operasional	x
Laporan Perubahan Ekuitas	x
Catatan atas Laporan Keuangan	x
Penjelasan Umum	x
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
Pengungkapan Penting Lainnya	x
Lampiran dan Daftar	x

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
JL RAYA ABEPURA No. 37 KOTARAJA, JAYAPURA, PAPUA  
TELEPON 022 7207045, FAXIMILE 0227207045**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 31 Desember 2023  
Kepala Kantor Wilayah,



Anthonyus M. Ayorbaba  
NIP. 197105151996101001

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 200.467.887 atau mencapai 132 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp151.302.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember pada TA 2023 adalah sebesar Rp 103,296,062,588 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 104.056.916.000.

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 574.634.000.762 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 5.098.787.930; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 574.634.000.762; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2.667.552.529.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 4.83815.116.551 dan Rp 568.276.595.952.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 157.123.681, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 115.755.319.316 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (115.598.195.635). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 37.200.122 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (114.557.064).

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 578.957.860.526 ditambah Defisit-LO sebesar Rp107.906.474.118 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp34.988.972 dan ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp109.314.948.526 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 580.550.258.467.

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023				2022				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0	
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	151.302.000	151.303.000	3.810.230	103	104.977.000	126.832.286	21.855.286	121	
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>151.302.000</b>	<b>151.302.000</b>	<b>3.810.230</b>	<b>103</b>	<b>104.977.000</b>	<b>126.832.286</b>	<b>21.855.286</b>	<b>121</b>	
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0	
	BELANJA PEGAWAI	49.568.815.000	37.473.406.303	(12.095.408.697)	76	41.454.789.000	35.381.912.040	(6.072.876.960)	85	
	BELANJA BARANG	49.857.953.000	35.207.289.502	(14.650.663.498)	71	51.019.228.000	30.525.255.389	(20.493.972.611)	60	
	BELANJA MODAL	4.630.148.000	555.273.000	(4.074.875.000)	12	2.250.000.000	2.246.253.379	(3.746.621)	100	
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>104.056.916.000</b>	<b>73.235.968.805</b>	<b>(30.820.947.295)</b>	<b>51</b>	<b>94.724.017.000</b>	<b>68.153.420.808</b>	<b>(26.570.596.192)</b>	<b>72</b>	
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0	

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**II. NERACA****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

PERKIRAAN NAMA	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	428.991.000	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	73.266.500	0,00
Piutang Bukan Pajak	0	2.742.635	7.455.093	270,82
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(13.713)	13.713	(100,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	2.728.922	7.468.806	273,69
Persediaan	5.089.787.930	4.559.334.096	(175.528.877)	(3,85)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>5.089.787.930</b>	<b>4.562.063.018</b>	<b>334.197.429</b>	<b>7,33</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	310.312.858.000	310.312.858.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	64.925.671.597	54.490.195.251	204.576.201	0,38
Gedung dan Bangunan	290.427.893.585	290.076.221.585	307.498.000	0,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.905.000	237.905.000	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	231.007.685	231.007.685	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.882.268.303			
AKUMULASI PENYUSUTAN	(95.323.603.408)	(81.727.413.226)	(6.890.530.627)	8,43
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>574.634.000.782</b>	<b>573.620.774.295</b>	<b>(6.378.456.426)</b>	<b>(1,11)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1.835.281.742			
Aset Lain-lain	5.041.581.153	4.347.905.354	525.918.799	12,10
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4.209.310.366)	(3.453.040.586)	(557.215.789)	16,14
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.667.552.529</b>	<b>894.864.768</b>	<b>(31.296.990)</b>	<b>(3,50)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.841.082.754</b>	<b>579.077.702.081</b>	<b>(6.075.555.987)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.841.082.754	119.841.555	3.120.251.462	2.603,65
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.841.082.754</b>	<b>119.841.555</b>	<b>4.713.228.001</b>	<b>3.932,88</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1.841.082.754</b>	<b>119.841.555</b>	<b>4.713.228.001</b>	<b>3.932,88</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	580.550.258.467	578.957.860.526	(10.788.783.988)	(1,86)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>580.550.258.467</b>	<b>578.957.860.526</b>	<b>(10.788.783.988)</b>	<b>(1,86)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>580.550.258.467</b>	<b>578.957.860.526</b>	<b>(10.788.783.988)</b>	<b>(1,86)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>582.391.341.221</b>	<b>579.077.702.081</b>	<b>(6.075.555.987)</b>	<b>(1,05)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	157,123,681	79,144,870	5,310,675	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	157,123,681	79,144,870	5,310,675	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	157,123,681	79,144,870	5,310,675	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	49,161,291,166	27,769,733,242	(340,526,090)	-
Beban Persediaan	6,068,601,748	1,278,608,472	960,285,578	-
Beban Barang dan Jasa	37,704,564,137	14,900,403,147	2,763,536,141	-
Beban Pemeliharaan	5,456,650,381	3,146,662,488	578,840,046	-
Beban Perjalanan Dinas	3,895,311,509	1,423,267,862	689,795,250	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	9,910,000	(9,910,000)	-
Beban Bunga	0	0	0	-

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan	6,577,715,151	5,765,492,591	812,222,560	-
Amortisasi Beban	(13,713)	0	(13,713)	-
Penyisihan Piutang Tak	0	0	0	-
TertagihBeban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-LainJUMLAH BEBAN	83,547,746,498	54,294,077,802	5,454,229,772	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN	(83,425,806,769)	(54,214,932,932)	(5,448,919,097)	-
OPERASIONALKEGIATAN NON	0	0	0	-
OPERASIONAL	3,399,999	0	799,999	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	3,399,999	0	799,999	-
Non LancarPendapatan	0	0	0	-
Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non	0	0	0	-
Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban	37,200,122	12,255,748	(5,055,668)	-
Jangka PanjangPendapatan Penyelesaian	37,200,122	12,255,748	(5,055,668)	-
Kewajiban Jangka Panjang Beban	0	0	0	-
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	12,255,748	(4,255,669)	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non	(83,385,206,648)	(54,202,677,184)	(5,453,174,766)	-
Operasional Lainnya Pendapatan dari	0	0	0	-
Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban	0	0	0	-
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL	(83,385,206,648)	(54,202,677,184)	(5,453,174,766)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR				
BIASAPOS LUAR BIASA				
Beban Luar BiasaPOS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT - LO				

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 202 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	578.957.860.526	577.584.375.090	1.373.485.436	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(115.557.594.064)	(107.906.474.118)	(5.453.174.766)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(435.796.434)	(34.988.972)	(429.259.265)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(435.810.147)	(34.988.972)	(429.259.265)	-
LAIN-LAIN	13.713	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	117.585.788.439	109,314.948.526	5.401.753.725	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1.592.397.941	1.373.485.436	(480.680.306)	-
EKUITAS AKHIR	580.550.258.467	578.957.860.526	892.805.130	-

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Gedung Menara Tinggi, Bandung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berkomitmen dengan misi "**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.**" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,

Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

#### A.3 Basis Akuntansi

*Basis Akuntansi*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  
Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

*Belanja*

**(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset*

**5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:  
Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

### *Piutang Jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

### *Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran*

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 96.890.743.000

Rincian Perubahan DIPA  
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB		
<b>Jumlah Pendapatan</b>		
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang		
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
<b>Jumlah Belanja</b>		

*Realisasi Pendapatan Rp 85.000.531*

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 85.000.531 atau mencapai 56 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp151.302.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Hasil Kemandirian Narapidana dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian

sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023  
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	799.999	0
Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan bangunan	112.934.000	60.442.817	53,52
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	38.368.000	13.815.000	36,01
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7.200.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.742.635	0
<b>Jumlah</b>	<b>151.302.000</b>	<b>85.000.531</b>	<b>56.18</b>

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2023 mengalami kenaikan 10,25 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya aktivitas Pelaksanaan Kemandirian Narapidana pada Satuan Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha mengalami kenaikan sebesar 42,85 persen yang berasal pendapatan sewa atas rumah dinas dan lahan kantor sebagai kantin.

Selain itu, Pendapatan Lain-lain lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan sebesar 16,67 persen karena berkurangnya pendapatan pengembalian atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	50.000.000	35.000.000	42,85
Pendapatan Pendidikan	645.000.000	585.000.000	10,25
Pendapatan Lain-lain	25.000.000	30.000.000	(16,67)

<b>Jumlah</b>	<b>720.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>10,77</b>
---------------	--------------------	--------------------	--------------

Realisasi Belanja

Rp 49.329.379.758

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp 103.296.062.588 atau 99 % dari anggaran belanja sebesar Rp 104.056.916.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024  
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	49.568.916.000	49.165.617.966	59
Belanja Barang	49.857.953.000	49.526.492.994	49
Belanja Modal	4.630.148.000	4.603.951.628	11
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>104.056.916.000</b>	<b>103.296.062.588</b>	<b>51</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>104.056.916.000</b>	<b>103.296.062.588</b>	<b>51</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 28,80 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

Peningkatan belanja pegawai dikarenakan Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2022

Meningkatnya Belanja Modal disebabkan adanya pengadaan Lahan yang akan diperuntukkan sebagai pengembangan gedung pelayanan dan perkantoran serta area untuk aktivitas perkantoran. Peningkatan juga dikarenakan adanya renovasi atas gedung pelayanan.

Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung operasional perkantoran dan pelayanan serta pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Meningkatnya Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2021	%
Belanja Pegawai	24.395.667.068	22.265.182.210	54
Belanja Barang	24.378.439.690	19.841.520.383	39
Belanja Modal	555.273.000	1.868.770.379	83

Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>49.329.379.758</b>	<b>94.724.017.000</b>	<b>46</b>

Belanja Pegawai Rp  
24.395.667.068

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24.395.667.068 dan Rp 22.265.182.210. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakaoleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,81 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2022.

Adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan diluar jam kerja sehingga menyebabkan kenaikan signifikan Belanja Lembur.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.931.000.000	4.800.000.000	2,73
Belanja Lembur	463.700.000	280.000.000	19,60
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.950.000.000</b>	<b>6.430.000.000</b>	<b>8,09</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>(50.000.000)</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>66,67</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.900.000.000</b>	<b>6.400.000.000</b>	<b>7,81</b>

Belanja Barang Rp  
24.378.439.690

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24.378.439.690 dan Rp 19.841.520.383. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 39 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,

Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,

Peningkatan Belanja Jasa Profesi untuk mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat, dan

Peningkatan belanja barang untuk diserahkan kepada

masyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas seiring dengan meningkatnya kegiatan yang dilakukan diluar kantor dan undangan kegiatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Barang Operasional	3.337.000.000	4.070.000.000	(18,00 )
Belanja Barang Non Operasional	400.000.000	270.000.000	48,18
Belanja Persediaan	800.000.000	650.000.000	23,07
Belanja Jasa	2.224.000.000	1.630.000.000	36,44
Belanja Pemeliharaan	1.855.000.000	1.456.000.000	27,40
Belanja Perjalanan Dinas	1.834.000.000	1.444.000.000	27,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>12.700.000.000</b>	<b>10.990.000.000</b>	<b>15,56</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.700.000.000</b>	<b>10.990.000.000</b>	<b>15,56</b>

Belanja Modal Rp  
5.085.155.000

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 555.273.000 dan Rp 1.868.770.379. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 83 persen dibandingkan TA 2022 disebabkan rencana peningkatan kapasitas kerja Satker Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun kemudian sehingga perlu membeli lahan baru untuk pembangunan Gedung Kantor nantinya. Selain itu, peningkatan belanja modal disebabkan adanya renovasi penambahan ruang Gedung Kantor, pembelian peralatan yang akan digunakan pada gedung yang sudah selesai direnovasi dan untuk peningkatan fasilitas jaringan untuk menunjang pelaksanaan tugas Satker.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247.775.000	1.500.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.050.000.000	66,67
Belanja Penambahan Nili Gedung Dan Bangunan	307.498.000	400.000.000	45,00

<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>555.273.000</b>	<b>6.220.000.000</b>	<b>73,47</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>555.273.000</b>	<b>6.220.000.000</b>	<b>73,47</b>

*Belanja Modal Tanah  
Rp 0*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)


*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp247.775.000*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp 247.775.000 mengalami kenaikan sebesar 46,67 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.500.000.000. Hal ini disebabkan oleh adanya renovasi gedung kantor satker-satker lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung. Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
Komputer Unit	1.100.000.000	800.000.000	37,50
A.C Split	750.000.000	450.000.000	66,67
Meja dan Kursi	350.000.000	250.000.000	40,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>46,67</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>46,67</b>

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp0*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.050.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 66,67 persen dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi beberapa Gedung Kantor satker lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menampung para

pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.  
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Gedung Kantor	1.750.000.000	1.050.000.000	66,67
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>66,67</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>66,67</b>

*Belanja Modal Jalan,  
Irigasi dan Jaringan  
Rp0*

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Jaringan			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>			
<b>Jumlah Belanja Modal</b>			

*Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Software			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>			
<b>Jumlah Belanja Modal</b>			

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>			
<b>Jumlah Belanja Modal</b>			

## PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp  
4.896.260.447

### C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 4.896.260.447 dan Rp 4.562.063.018.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp 0

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0

#### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
------------	------------	------------

Uang Tunai		
Rekening Bank		
<b>Jumlah</b>		

Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp 0

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Jumlah</b>		

Piutang Bukan Pajak R00

### C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB		
Piutang Lainnya		
<b>Jumlah</b>		

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  
Rp0

### C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-----	--------	------------	------------


Bagian Lancar  
Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0

**C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih – Piutang  
Jk. Pendek Rp0

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek  
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			

Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>			
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>			

Beban Dibayar di Muka  
Rp0

### C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
<b>Jumlah</b>		

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

### C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 2021*  
*(dalam rupiah)*

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
<b>Jumlah</b>		

Persediaan  
Rp4.383.805.219

### C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 4.383.805.219 dan Rp4.559.334.096 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	2.974.629.041	
Barang untuk Pemeliharaan	409.295.000	
Amunisi	999.881.178	
<b>Jumlah</b>	<b>4.383.805.219</b>	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap  
Rp  
567.242.317.869

### C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 567.242.317.869 dan Rp573.620.774.295. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah  
Rp310.312.858.000

#### C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 310.312.858.000 dan Rp 310.312.858.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Tanah*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah	
Reklasifikasi Masuk	
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	
Penghapusan	
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	

Mutasi tambah:

Pembelian tanah pada tahun 2022 berlokasi di Kota Bogor, Papua.

Hibah berasal dari Pemerintah Jawa Timur.

Mutasi kurang:

Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2021. Tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Matoa No.20 pada Kantor Akuntansi Bogor, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor

54.694.771.452

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 30 September 2023 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 54.694.771.452 dan Rp 54.490.195.251. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2023</b>	<b>54.694.771.452</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	247.775.000
Hibah	
Transfer Masuk	
Reklasifikasi Masuk	
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Penghapusan	
<b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>	<b>54.694.771.452</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>	<b>54.694.771.452</b>

Mutasi tambah:  
Pembelian berupa:

*Tabel xx*  
*Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2022*  
*(dalam rupiah)*

No.	Peralatan dan Mesin	Nilai
1.	Komputer Unit	200.000.000
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.550.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.750.000.000</b>

Hibah berupa alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai 372.215.000. Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.

Transfer Masuk berupa komputer unit dan peralatan komputer dari Badan Teknologi senilai Rp175.000.000

Reklasifikasi Masuk berupa Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp50.000.000

Koreksi Tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp44.000.000

Mutasi kurang:  
Penghentian alat studio, komunikasi, dan alat pemancar dari penggunaannya senilai Rp32.500.000 dan diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain.

Penghapusan sebesar Rp308.715.000 merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Gedung dan Bangunan*  
*Rp16.500.000.00*

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**  
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021

masing-masing adalah sebesar Rp16.500.000.000 dan Rp14.000.000.000.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2022*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>14.000.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	

Mutasi tambah:

Pembangunan gedung kantor dan renovasi ruang kerja sebesar Rp2.562.785.000.

Mutasi kurang:

Koreksi kurang sebesar Rp62.785.000 yang merupakan koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
*Rp680.000.000*

#### **C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp680.000.000 dan Rp100.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>200.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	1.160.000.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.360.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(184.000.000)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.176.000.000</b>

Mutasi tambah:

Berupa penambahan jaringan teknologi informasi di seluruh lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp210.000.000*

#### **C.2.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp210.000.000 dan Rp180.000.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya*

*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>		<b>180.000.000</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian		30.000.000
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan		-
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>		<b>210.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022		(86.000.000)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>		<b>124.000.000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan*  
*Rp750.000.000*

### **C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya pada Kantor Akuntansi Bogor belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021*

*(dalam rupiah)*

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.	02/KPA.KA/20 22	500.000.000	75	375.000.000	KA Bandung
2.	10/KPA.KA/20 22	500.000.000	75	375.000.000	KA Bogor
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>750.000.000</b>	

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
*Rp5.607.250.000*

### **C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.607.250.000 dan Rp4.501.000.000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

*Tabel xx*  
*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

*(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	4.150.000.000	1.317.900.000	2.832.100.000

2.	Gedung dan Bangunan	16.500.000.000	4.021.100.000	12.478.900.000
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	680.000.000	182.250.000	497.750.000
4.	Aset Tetap Lainnya	210.000.000	86.000.000	124.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>21.540.000.000</b>	<b>5.607.250.000</b>	<b>31.321.400.000</b>

Piutang Jangka Panjang  
Rp248.450.000

### C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp248.450.000 dan Rp133.380.000.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  
Rp164.000.000

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp164.000.000 dan Rp90.000.000

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Kanwil Akuntansi Papua	22.500.000	-
2.	Kantor Akuntansi Bandung	54.000.000	45.000.000
3.	Kantor Akuntansi Bogor	36.870.000	12.000.000
4.	Kantor Akuntansi Bekasi	48.660.000	6.470.000
5.	Kantor Akuntansi Cirebon	1.970.000	-
6.	Kantor Akuntansi Sukabumi	-	26.530.000
	<b>Jumlah</b>	<b>164.000.000</b>	<b>90.000.000</b>

Tagihan Penjualan Angsuran  
Rp92.000.000

#### C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92.000.000. dan Rp50.400.000, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Piutang TPA TA 2022 dan 2021  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp7.550.000

### C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp7.550.000 dan Rp7.020.000.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.  
Panjang  
TA 2022

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
<b>Jumlah</b>			
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>			

Aset Lainnya  
Rp624.000.000

### C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp624.000.000 dan Rp193.000.000.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya.

Aset Tak  
Berwujud

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember

Rp400.000.000

2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp400.000.000 dan Rp40.000.000.

Tabel xx  
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software Komputer	240.000.000
2.	ATB Lainnya	160.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>400.000.000</b>

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut.

Tabel xx  
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>40.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	360.000.000
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>400.000.000</b>
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(81.000.000)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>319.000.000</b>

Mutasi tambah:

Pembelian aplikasi penatausahaan PNPB Wilayah Akuntansi Papua sebesar Rp200.000.000.

Penambahan fitur pada Aplikasi Akuntansi Terpadu sebesar Rp160.000.000.

Aset Lain-Lain  
Rp390.000.000

#### C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp390.000.000 dan Rp220.000.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>220.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	250.000.000
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(50.000.000)
Penghapusan BMN	(30.000.000)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>390.000.000</b>
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(85.000.000)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>305.000.000</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp250.000.000 dan diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain.

Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.

Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp30.000.000 merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp166.000.000

#### C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp166.000.000 dan Rp67.000.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset  
Lainnya TA 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1.	Software	240.000.000	54.000.000	186.000.000
2.	ATB Lainnya	160.000.000	27.000.000	133.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>400.000.000</b>	<b>81.000.000</b>	<b>319.000.000</b>
<b>B.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	390.000.000	85.000.000	305.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>305.000.000</b>
	<b>Total</b>	<b>790.000.000</b>	<b>166.000.000</b>	<b>624.000.000</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp437.160.000

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp437.160.000 dan Rp371.850.000.

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp20.000.000

##### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp20.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka

kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.  
Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2022*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2022
	<b>Jumlah</b>	

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp134.080.000*

### **C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp134.080.000 dan Rp18.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	72.280.000
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	15.000.000
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	46.800.000
<b>Total</b>		<b>134.080.000</b>

*Pendapatan Diterima di Muka Rp164.200.000*

### **C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp164.200.000 dan Rp165.400.000.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022*  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah	Keterangan
Badan Swasta	65.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	24.900.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	73.800.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
<b>Jumlah</b>	<b>164.200.000</b>	

*Beban yang Masih Harus*

### **C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar**

*Dibayar*  
*Rp118.880.000*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp118.880.000 dan Rp188.450.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan 2021*  
*(dalam rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	21.745.000	70.010.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	55.755.000	54.090.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	41.380.000	64.350.000
<b>Jumlah</b>	<b>118.880.000</b>	<b>188.450.000</b>

*Ekuitas*  
*Rp31.871.525.000*

### **C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan  
PNBP  
Rp757.530.000

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp757.530.000 dan Rp645.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	60.000.000	45.000.000	33,33
Pendapatan Pendidikan	672.530.000	565.000.000	19,03
Pendapatan Lain-lain	25.000.000	35.000.000	(28,57)
<b>Jumlah</b>	<b>757,530.000</b>	<b>645.000.000</b>	<b>17,44</b>

Pendapatan akrual pada Satker Lingkup Kanwil Akuntansi berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp6.940.000.000

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.990.000.000 dan Rp5.865.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Gaji	3.620.000.000	3.356.000.000	7,86
Beban Tunjangan-tunjangan	2.290.000.000	2.060.000.000	11,17
Beban Honorarium dan Vakasi	630.000.000	545.000.000	15,60
Beban Lembur	450.000.000	390.000.000	15,38
<b>Jumlah Beban</b>	<b>6.990.000.000</b>	<b>6.351.000.000</b>	<b>15,38</b>

Beban Pegawai  
Rp1.487.000.00  
0

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.437.000.000 dan Rp1.352.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Persediaan Konsumsi	625.000.000	595.000.000	5,04
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	520.000.000	490.000.000	6,12
Beban Persediaan Lainnya	292.000.000	267.000.000	9,36
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.487.000.000</b>	<b>1.352.000.000</b>	<b>9,98</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa  
Rp3.724.000.00  
0

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.724.000.000 dan Rp3.542.100.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	595.000.000	680.000.000	(12,50)
Beban Penambah Daya Tahan	105.000.000	140.000.000	(25,00)

Tubuh			
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	290.000.000	380.000.000	(23,68)
Beban Honor Operasional Satker	169.000.000	120.000.000	40,83
Beban Bahan	250.000.000	140.000.000	78,57
Beban Honor Output Kegiatan	150.000.000	80.000.000	87,5
Beban Langganan Listrik	700.000.000	530.000.000	32,07
Beban Langganan Telepon	300.000.000	380.000.000	(21,05)
Beban Sewa	530.000.000	627.100.000	(15,48)
Beban Jasa Profesi	600.000.000	420.000.000	42,86
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	35.000.000	45.000.000	(22,22)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>3.724.000.000</b>	<b>3.542.100.000</b>	<b>5,13</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan  
Rp1.955.000.000

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.955.000.000 dan Rp1.688.000.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.300.000.000	1.130.000.000	15,04
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	575.000.000	488.000.000	17,83
Beban Pemeliharaan Lainnya	80.000.000	70.000.000	14,29
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.955.000.000</b>	<b>1.688.000.000</b>	<b>15,82</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas  
Rp1.934.000.000

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.934.000.000 dan Rp1.480.000.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi

atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	820.000.000	630.000.000	30,16
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	220.000.000	180.000.000	22,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	250.000.000	190.000.000	0,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	644.000.000	480.000.000	31,58
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.934.000.000</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>33,80</b>

**D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp2.250.000.000*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.250.000.000 dan Rp1.570.000.000. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.500.000.000	1.000.000.000	50,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	750.000.000	570.000.000	31,57
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>1.570.000.000</b>	<b>43,31</b>

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

*Beban Bantuan Sosial Rp200.000.000*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp140.000.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	200.000.000	140.000.000	42,86
<b>Jumlah Beban</b>	<b>200.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>42,86</b>

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp1.175.000.000

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.000.000 dan Rp736.400.000. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	630.100.000	450.000.000	40,02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	335.900.000	199.400.000	78,48
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.000.000	30.000.000	126,67
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.000.000	32.000.000	31,25
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.076.000.000</b>	<b>711.400.000</b>	<b>51,25</b>
Beban Amortisasi Software	54.000.000	-	100,00
Beban Amortisasi ATB Lainnya	27.000.000	-	100,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	18.000.000	25.000.000	(28,00)
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>99.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>296,00</b>
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.175.000.000</b>	<b>736.400.000</b>	<b>59,56</b>

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih  
Rp5.030.000

untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.030.000 dan Rp4.010.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	4.500.000	3.500.000	28,57
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	530.000	510.000	3,92
<b>Jumlah Beban</b>	<b>5.030.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>25,44</b>

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp16.000.000

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Penjualan Alat Kantor	23.000.000	13.000.000	76,92
Selisih Kurs	(2.000.000)	-	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.000.000		100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(10.000.000)	(4.500.000)	(122,22)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>16.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>88,23</b>

**D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa  
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021.

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp19.778.025.000

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp19.778.025.000 dan Rp11.139.285.000.

Defisit LO  
Rp18.896.500.000

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah defisit sebesar Rp18.896.500.000 dan Rp16.210.010.000. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi  
Rp0  
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

### E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

#### E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp250.000.000.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan  
Rp577.885.000

#### E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp577.885.000 dan Rp458.750.000 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2022

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	350.000.000
2.	Suku Cadang	150.000.000
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	70.885.000
4.	Barang Persediaan Lainnya	7.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>577.885.000</b>

Selisih Revaluasi Aset  
Rp450.000.000

#### E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp450.000.000 dan Rp124.000.000. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Bogor.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi  
Rp35.000.000

#### E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp35.000.000 dan Rp82.000.000.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	27.785.000
Gedung dan Bangunan	(62.785.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(35.000.000)</b>

Koreksi Lain-lain  
Rp117.115.000

#### E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp117.115.000 dan Rp184.000.000.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2022

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	42.500.000
Koreksi Pendapatan	31.500.000
Koreksi Piutang	21.115.000
Koreksi Kewajiban	16.500.000
Koreksi Hibah	5.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>117.115.000</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp29.880.000.000  
0

#### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp29.880.000.000 dan Rp23.750.000.000

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx

Transaksi Antar Entitas TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	720.000.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(30.590.000.000)
Transfer Masuk	(250.000.000)
Transfer Keluar	70.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	170.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>(29.880.000.000)</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

##### E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp720.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp30.590.000.000.

### E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp250.000.000 terdiri dari:

*Tabel xx*  
*Transfer Masuk TA 2022*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Kantor Akuntansi Surabaya	(100.000.000)
2.	Persediaan	Biro Umum	(150.000.000)
<b>Jumlah</b>			<b>(250.000.000)</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp70.000.000 yang merupakan transfer Persediaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

### E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total R0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Pengesahan Hibah Langsung TA 2023*

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
<b>Total Pengesahan</b>			
Pengesahan Pengembalian Hibah			
<b>Jumlah</b>			

*Ekuitas Akhir*  
*Rp568.276.595.9*  
*52*

### E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 568.276.595.952 dan Rp. 569.703.860.664.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 Pengungkapan Lain-lain**

-

